



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA
TIMUR I

JALAN RAYA BANDARA JUANDA NOMOR 39, DESA SEMAMBUNG, SIDOARJO 61254
TELEPON (031) 8675356; FAKSIMILE (031) 8675335; LAMAN WWW.BEACUKAIJATIM1.COM
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL KWBCJATIM1@CUSTOMS.GO.ID

CHECKLIST PERMOHONAN PENETAPAN KITE PEMBEBASAN/ KITE PENGEMBALIAN

NAMA PERUSAHAAN :

ALAMAT KANTOR :

ALAMAT PABRIK :

NPWP :

BIDANG USAHA :

PMK 160/PMK.04/2018 dan 161/PMK.04/2018
PERDIRJEN 03/BC/2019 dan 04/BC/2019

NO	URAIAN	ASLI/ COPY	
		ADA	TIDAK ADA
1	Surat permohonan KITE Pembebasan/ KITE Pengembalian		
2	Daftar isian permohonan KITE Pembebasan/ KITE Pengembalian		
3	Surat Kuasa Pegawai yang ditugaskan dan fotocopy identitas		
4	a. Laporan Keuangan dari auditor independen 2 (dua) tahun terakhir, opini tidak <i>disclaimer</i> atau <i>adverse</i> ; atau b. Paparan sistem pengendalian intern (SPI) dalam hal badan usaha baru berdiri atau belum memiliki laporan hasil audit dari auditor independen		
5	Konversi		
6	Pengelolaan barang yang dibuktikan dengan adanya paparan sistem informasi persediaan berbasis komputer (<i>IT Inventory</i>) dalam bentuk <i>print screen</i> dan buku manual atas sistem informasi persediaan berbasis komputer (<i>IT Inventory</i>), yang memiliki kriteria sebagai berikut: a. Adanya keterkaitan pemasukan Bahan Baku dengan dokumen kepabeanaan impor yang berasal dari: 1) Luar daerah pabean; 2) Kawasan berikat; 3) Gudang Berikat; 4) Kawasan Bebas yang dilakukan oleh pengusaha di Kawasan Bebas yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Bebas; dan/atau 5) Kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah;		

	<ul style="list-style-type: none"> b. Adanya keterkaitan pengeluaran Hasil Produksi dengan dokumen kepabeanaan ekspor; c. Dapat digunakan untuk mengetahui mutasi Bahan Baku dan Hasil Produksi secara berkelanjutan dan <i>real time</i>; d. Adanya pemisahan dengan penggunaan kode yang berbeda atas barang dan/atau bahan yang mendapatkan fasilitas Pembebasan, barang dan/atau bahan yang mendapatkan fasilitas Pengembalian, barang dan/atau bahan yang tidak mendapatkan fasilitas Pembebasan dan fasilitas Pengembalian, dan <i>waste/scrap</i>; e. Dapat menghasilkan laporan sebagai berikut: laporan pemasukan Bahan Baku; <ul style="list-style-type: none"> 1) laporan pemasukan Bahan Baku; 2) laporan pemakaian Bahan Baku; 3) laporan pemakaian barang dalam proses dalam rangka kegiatan subkontrak; 4) laporan pemasukan Hasil Produksi; 5) laporan pengeluaran Hasil Produksi; 6) laporan mutasi Bahan Baku; 7) laporan mutasi Hasil Produksi; dan 8) laporan penyelesaian <i>waste/scrap</i>; <p>Laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 digunakan sebagai dasar pembuatan laporan pertanggungjawaban (BCL-KT.01) Bahan Baku.</p>		
6	Nomor Induk Berusaha (NIB) /izin usaha industri (IUI) beserta perubahannya;		
7	Bukti kepemilikan pabrik/ kegiatan produksi dan tempat penimbunan barang berupa sertifikat, bila sewa : <ul style="list-style-type: none"> a. lampiran Perjanjian sewa diketahui oleh notaris b. untuk pabrik / kegiatan produksi minimal 3 tahun c. untuk tempat penimbunan barang minimal 6 bulan 		
8	Denah serta peta lokasi		
9	Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK)		
10	<ul style="list-style-type: none"> a. Bagan alur proses produksi /Flowcart proses produksi b. Surat Pernyataan masa produksi 		
11	Rencana impor dari negara, rencana ekspor tujuan negara, daftar Bahan Baku, daftar Hasil Produksi		
12	Badan usaha penerima subkontrak, lampiranpersyaratan : <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor Induk Berusaha penerima subkontrak, b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penerima subkontrak, c. Denah serta peta lokasi penerima subkontrak, d. Surat perjanjian/kontrak kerja, e. Bukti penguasaan lahan lokasi penerima subkontrak 		
13	Daftar Mesin		
14	API-P dan KTP Direktur,		
15	NPWP Perusahaan dan NPWP Direktur		
16	Akte Pendirian dan perubahan terakhir		

17	Daftar Pelabuhan Bongkar 1. 2. 3. dst		
18	Struktur Organisasi		
Permohonan sebagaimana tersebut diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan melampirkan pembuktian kriteria dan persyaratan dalam bentuk <i>soft copy</i> berupa hasil <i>scan</i> dari dokumen asli dalam media penyimpan data elektronik.			
TANPA BIAYA			

[] DITOLAK [] DITERIMA

Tanggal, 20....
PEMERIKSA,

.....
NIP.